

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly, M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Bengen. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2001.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dahuri, Rokhmin. *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran Dr. Ir. Rokhim Dahuri MS)*. Jakarta: Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia. 2000.
- Gunanegara. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Tatanusa. 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. 1993.
- _____. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke-9. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke-11. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Kurnardi, Moh, Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*, cetakan ketujuh. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2008.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- _____. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radja Press. 1985.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalis Indonesia. 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2005.

Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, cetakan kedelapan, Jakarta: Balai Buku Ihtiar. 1985.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1994 tentang Repelita VI.

Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekunjur).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000- 2010.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDRTK) Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) Tahun 2000-2010.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1900 Tahun 2009 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Keputusan Gubernur No. 1901 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Sementara *Care Taker* Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 09-05-1996 Nomor: 410-1293 perihal Penerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

Karya Ilmiah

Addiwiansyah, Rizki. *“Pengaturan Reklamasi Pantai Marina Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 di Kota Semarang”*, Laporan Kegiatan, Universitas Diponegoro, Semarang. 2005.

Arif, Ainul. *“Penataan Wilayah Pesisir Kota Semarang”*, Makalah, Universitas Diponegoro, Semarang. 2007.

Arnold. *“Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Pengurusan Areal Reklamasi Pantai Utara Jakarta (Perbandingan dengan Reklamasi Pantai Losari Makassar dan Pantai Boulevard Manado)”* Skripsi, Universitas Pelita Harapan, Tangerang. 2015.

Maskur, Ali. *“Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang”*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. 2008.

Jurnal

Huda, Moch. Choirul. *Jurnal Perspektif*, *“Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup”*. Vol. XVIII No. 2. 2013.

Marwanta, Bambang. *Jurnal Alami*, *“Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta”*. Volume. 8, No. 2. 2003.

Mezak, Meray Hendrik. *Law Review*, *“Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”*. Vol. V No. 3, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2006.

Rellua, Olivianty. *Lex Administratum*, *“Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Reklamasi Pantai.”* Vol. I No. 2. 2013.

Rusli, Hardijan. *Law Review*, *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”* Vol. V No. 3, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 2006.

Majalah

“Ahok Terbitkan Lima Izin Reklamasi,” *Majalah Tempo*, 10 Desember 2015.

Djakapermana, Ruchyat Deni. 2010. *Bulletin Kategori Wacana, “Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan”*. Edisi Juli-Agustus.

“Moratorium Reklamasi Dicabut, Ini Permintaan Menteri Luhut Ke DKI”, *Majalah Tempo*, 7 Oktober 2017.

“Pulau Baru di Teluk Jakarta“, *Majalah Tempo*, 7 Juni 2015.

Surat Kabar

Damanik, M Riza, “Solusi Reklamasi Untuk Ahok,” *Koran Kompas*, 24 November 2015.

“Reklamasi Ubah Wajah Jakarta,” *Koran Kompas*, 30 November 2015.

“Dilema Reklamasi Pantai Jakarta”, *Kompas*, 11 November 2015.

Internet

“Pentingnya Informasi Geospasial untuk Menata Laut Indonesia”,
<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia>.

“Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2015”,
<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366>.

“Rusun Sewa Akan Dibangun Di 17 Pulau Hasil Reklamasi”,
<http://poskotnews.com/rusun-sewa-akan-dibangun-di-17-pulau-hasil-reklamasi/>.

“Sidang Pertama Gugatan 6 Perusahaan Kontraktor BP Pantura Digelar”,
<http://www.menlh.go.id/sidang-pertama-gugatan-6-perusahaan-kontraktor-bp-pantura-digelar/>.

“Lima Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta”,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/16/04/06/o56z5t282-5-dampak-negatif-reklamasi-teluk-jakarta>.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, *Gambaran Umum Wilayah Pesisir Kota Semarang*, www.semarangkota.go.id/portal/RPJMD%202011/BAB%202.pdf.

“Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, <http://www.jakarta.go.id/v2/news/2014/09/reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-dimulai-2015.WfW7fFuCzIU>.

“Jokowi Serahkan Sertifikat Pulau Reklamasi C dan D kepada DKI”, <https://metro.tempo.co/read/901496/jokowi-serahkan-sertifikat-pulau-reklamasi-c-dan-d-kepada-dki>.

“Selain HGB Pulau D, Belum Ada HGB Pulau Reklamasi Lain Yang Diterbitkan”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/29/19103231/selain-hgb-pulau-d-belum-ada-hgb-pulau-reklamasi-lain-yang-diterbitkan>.

“Selain Pulau K, Ahok Juga Kalah PTUN untuk Reklamasi Pulau F”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170316225048-12-200749/selain-pulau-k-ahok-juga-kalah-ptun-untuk-reklamasi-pulau-f/>.

“Kasasi Ditolak MA, DKI Minta Moratorium Reklamasi Dicabut”, <https://pemilu.tempo.co/read/news/2017/08/11/083899173/Kasasi-Ditolak-MA-DKI-Minta-Moratorium-Reklamasi-Dicabut>.

“PTUN Cabut Izin Reklamasi Tiga Pulau di Teluk Jakarta”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39300056>.

“Memahami Proyek Reklamasi Teluk Jakarta”, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/memahami-proyek-reklamasi-teluk-jakarta/>.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menjatuhkan Sanksi Penghentian Sementara Reklamasi Pantura Jakarta” [http://ppid.menlhk.go.id/files/siaran_pers/press_release_reklamasi_pantura_jakarta-final_\(1\).docx](http://ppid.menlhk.go.id/files/siaran_pers/press_release_reklamasi_pantura_jakarta-final_(1).docx).

“Menko Maritim: Permasalahan Reklamasi Selesai, Moratorium Dicabut”, [http://ppid.menlhk.go.id/files/siaran_pers/press_release_reklamasi_pantura_jakarta-final_\(1\).docx](http://ppid.menlhk.go.id/files/siaran_pers/press_release_reklamasi_pantura_jakarta-final_(1).docx).

“Peraturan Mana yang Kini Jadi Acuan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/19/10044601/Peraturan.Mana.yang.Kini.Jadi.Acuan.Proyek.Reklamasi.Teluk.Jakarta.?page=all>.

“Menteri Susi: Kewenangan Izin Reklamasi Jakarta Ada di Gubernur DKI”, <https://news.detik.com/berita/3189076/menteri-susi-kewenangan-izin-reklamasi-jakarta-ada-di-gubernur-dki>.

“Wewenang Reklamasi Jakarta, Pemerintah Pusat atau Gubernur DKI?”,
<https://nasional.tempo.co/read/804081/ini-3-alasan-luhut-lanjutkan-reklamasi-teluk-jakarta>.

“Menteri LHK: Reklamasi Pantura Juga Harus Lihat Banten dan Jabar”,
<https://news.detik.com/berita/3190790/menteri-lhk-reklamasi-pantura-jakarta-juga-harus-lihat-banten-dan-jabar>.

“Soal Reklamasi, Menteri Susi Minta Kepastian Izin Amdal Terlebih Dahulu”,
<https://news.detik.com/berita/3299329/soal-reklamasi-menteri-susi-minta-kepastian-izin-amdal-terlebih-dahulu>.

Nur Endah Iswahyuni, “Analisis Kebijakan Reklamasi Pantai di Kawasan Pantai Marina Semarang,” <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/486/367>.

